

**PEMIKIRAN TAN MALAKA DALAM UPAYA
MERUMUSKAN KONSEP REPUBLIK UNTUK INDONESIA TAHUN 1925**

Makdura Dagang¹, Muhammad Iqbal Birsyada²

Email: Makdura21@gmail.com¹, iqbal@upy.ac.id²

Universitas PGRI Yogyakarta¹²

DOI: 10.31316/karmawibhanga.v7i01.6841

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui: (1) Kondisi sosial dan politik masyarakat Indonesia tahun 1925; (2) Konsep Republik yang digagas oleh Tan Malaka; (3) Dampak pemikiran Republik Tan Malaka terhadap pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode literatur yang dilakukan melalui pengidentifikasian sumber yang diperoleh kemudian sumber tersebut di jelaskan dengan melalui analisis sumber yang dalam tahap selanjutnya diuraikan dengan sistematis. Penelitian ini juga menggunakan langkah-langkah yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian ini mempunyai Kesimpulan: (1) kondisi sosial dan politik di Indonesia dipengaruhi oleh sistem kolonial Belanda yang berlangsung begitu lama sehingga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat pribumi. Terdapat sistem Hirarki kelas di Indonesia diantaranya kelas atas (orang Belanda), kelas menengah (orang Arab, Cina, dan India), kelas bawah (orang Pribumi). Pemerintahan Belanda Menunjuk Gubernur Jendral Untuk memimpin wilayah Jajahannya di Indonesia. tercipta juga Dewan Hindia dan sistem Keresidenan sebagai Upaya untuk mengatur Indonesia. ketimpangan yang terjadi dalam skala sosial dan politik mengakibatkan Masyarakat Indonesia memiliki akses yang buruk terhadap segala bentuk layanan seperti Pendidikan, Kesehatan, pekerjaan, dan kepemilikan tanah. (2) Tan Malaka membuat salah satu upaya dengan cara merumuskan konsep republik bagi Indonesia sebagai Upaya untuk menyatukan Masyarakat agar terciptanya revolusi. Konsep republik tan Malaka memuat berbagai aspek seperti kemerdekaan Indonesia, kedaulatan rakyat, keadilan sosial dan ekonomi, serta Pendidikan dan kesadaran Politik. (3) dampak dari pemikiran tan Malaka tersebut mempengaruhi tokoh-tokoh pergerakan dan organisasi-organisasi perjuangan kemerdekaan seperti Soekarno, Muhamad Hatta, Sutan Syahrir, SI, PNI, dan PKI. Kelompok dan individu di negeri ini mulai semakin menyadari identitas nasionalnya dan menginginkan pemerintahannya terbebas dari kekuasaan kolonial Belanda.

Kata kunci: Peranan Tan Malaka, Konsep Republik, Revolusi

ABSTRACT

This research aims to determine: (1) The social and political conditions of Indonesian society in 1925; (2) The Republic concept initiated by Tan Malaka; (3) The impact of the thoughts of the Republic of Tan Malaka on the Indonesian independence movement. The method used in this research is the method of literature which is carried out through the identification of sources obtained then the source is explained through the analysis of sources which in the subsequent phase is systematically described. The research also uses measures that include heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The results of this study have a conclusion: (1) The social and political conditions in Indonesia were influenced by the Dutch colonial system that lasted so long that it affected various aspects of the life of indigenous peoples. There is a class hierarchy system in Indonesia including the upper class (Dutch), middle class (Arab, Chinese, and Indian), lower class (native people). The Dutch Government Appointed a Governor-General to lead its territory in Indonesia. Also created the Indian Council and the Keresidenan system as an attempt to regulate Indonesia. The social and political disparities resulted in poor access to all forms of services such as education, health, employment, and land ownership. (2) Tan Malaka made one of the attempts by formulating the concept of a republic for Indonesia as an attempt to unite the society in order to create a revolution. The concept of the Republic of Tan Malaka encompasses aspects such as Indonesian independence, people's sovereignty, social and economic justice, and education and political awareness. (3) The impact of such Tan Malaka thought affected the figures of the movement and organizations of the struggle for independence such as Soekarno, Muhamad Hatta, Sutan Syahrir, SI, PNI, and PKI. Groups and individuals in the country are becoming increasingly aware of their national identity and want their government free from Dutch colonial power.

Keywords: *Tan Malaka's role, Republic concept, Revolution*

Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup dalam kesendirian sehingga beberapa tindakan dan aspek-aspek kehidupan sering bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup. Proses bertahan hidup menciptakan kemungkinan interaksi sosial yang secara organik mengarah pada pembentukan komunitas disebuah wilayah (Ibrahim, 2022:17). Apakah wilayah tersebut seluruhnya berada di darat ataukah mencakup daratan dan lautan. Komunitas

atau masyarakat yang terbentuk dengan demikian berfungsi sebagai landasan fundamental bagi pembentukan sebuah negara.

Yunani kuno dan Roma, sebagai peradaban kuno, tidak menggunakan istilah Negara karena ukuran kecil Yunani dan ketergantungan mereka pada hak kepemilikan daripada keunggulan dalam taat. Demikian pula Masyarakat Romawi yang masih menjaga sistem perbudakan untuk dipraktikkan. Romawi kuno sering menggunakan istilah Civitas atau Republica daripada Negara. Istilah negara sebenarnya diterjemahkan dari istilah asing seperti Staat, State, dan Etat, masing-masing dengan definisi dan konotasi uniknya sendiri. Nama ini konon berasal dari kata *Lo Stato* yang pertama kali digunakan di Eropa Barat pada abad kelima belas. Berasal dari bahasa Italia, istilah *Lo Stato* awalnya berarti pihak yang diperintah. Kata Latin Status atau Statum adalah sumber dari kata bahasa Inggris *staat*, *state*, atau *etat*. Secara etimologis, kata 'status' dalam bahasa Latin klasik mengacu pada konsep abstrak yang menunjukkan posisi tegak dan permanen atau sesuatu dengan kualitas tersebut (Juniarso, 2017:55).

Interpretasi setiap era terhadap Negara berbeda-beda secara signifikan. Pertimbangan definisi negara yang diberikan oleh filsuf Yunani kuno Aristoteles dalam bukunya *Politics*, di mana negara untuknya terbatas pada apa yang sekarang dikenal sebagai polis. Perspektif Aristoteles didasarkan pada struktur negara pada saat itu, yang masih merupakan hasil dari interaksi antara warga. Hal ini kontras dengan abad ketujuh belas, ketika tiga pemikir terkemuka muncul dan menggambarkan Negara sebagai suatu entitas yang timbul dari konsensus dalam masyarakat. Pengertian Negara sebagai suatu badan yang berasal dari kesepakatan komunal dikemukakan oleh John Locke, Rousseau, dan Thomas Hobbes (Junaidi, 2016:2).

Negara tercipta dengan memiliki beberapa bentuk yang salah satunya adalah Republik. Republik adalah cara hidup kita sebagai masyarakat dan bertujuan untuk mendefinisikan keadilan, namun telah ditetapkan sejak awal bahwa lebih baik melihat hal-hal yang dapat mengembangkan negara secara adil daripada hal-hal yang dapat membentuk individu dengan adil. Keadilan harus menjadi salah satu kondisi terbaik yang dapat dibayangkan, maka penting untuk terlebih dahulu mendeskripsikan kondisi tersebut sebelum mengidentifikasi keadilan sebagai salah satu dari sekian banyak kualitas kesempurnaan (Sutrisman, 2019:8).

Tahapan-tahapan yang dilalui konsep republik secara historis dapat disusun dan diperjelas sebagai berikut; *Pertama*, latar belakang Athena dan Romawi kuno dalam kaitannya dengan Republik Aristoteles dan Cicero. Bagaimana keadilan berhubungan dengan politik adalah pertanyaan utama yang ingin dipecahkan. Para pendiri gagasan, khususnya Aristoteles,

memberikan tanggapan umum terhadap pertanyaan ini dengan menegaskan bahwa politik berkaitan dengan pengembangan karakter warga negara secara menyeluruh. Warga negara membangun cita-cita moral melalui politik kemudian bentuk-bentuk keadilan bisa ditegakkan dan kebebasan menjadi nomor dua di sini. *Kedua*, masalah yang ingin diatasi oleh republik pada abad kelima belas dan ketujuh belas adalah potensi pemerintahan independen untuk menentang atau menggantikan otoritas yang menindas. Menurut Machiavelli dan Harrington, kebebasan adalah cita-cita fundamental sebuah republik. Di sini, kebajikan-kebajikan awal Aristoteles dipahami dalam kerangka yang lebih terbatas dan instrumental. *Ketiga*, Tantangan yang dihadapi republik pada abad ke-18 adalah mencari tahu sejauh mana pemerintahan bebas dapat diperluas untuk mengakomodasi partisipasi dan ambisi setiap warga negara secara adil. Beberapa upaya coba dilakukan, terutama melalui konsep partisipasi untuk menentang otoritarianisme yang berakar pada sentralisme dan elitisme. Peran teori James Madison, bapak pendiri Amerika Serikat akhirnya terlihat yaitu mendukung pemerintahan perwakilan dengan federasi dan pembagian kekuasaan. Berbeda dengan Madison, menurut filsuf Perancis Jean Jaques Rousseau, prinsip kebebasan hanya dapat dipenuhi oleh republik yang kesatuan dan partisipatif sehingga ketidakadilan adalah musuh utama republik. *Keempat*, Di zaman modern, tantangan utama yang harus diatasi dalam sebuah gagasan republik adalah seberapa besar landasan politik dapat diberikan kepada banyak warga negara yang beragam secara moral dan budaya sehingga mereka dapat membentuk hubungan yang bermakna satu sama lain. Singkatnya, berapa banyak keberagaman yang bisa dijamin di luar gagasan liberal?, Aktor utama yang berperan dalam menjawab hal ini adalah Hannah Arendt dan Charles Taylor (Robet, 2021:16).

Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dan menjadi negara kesatuan berbentuk republik yang memiliki kilasan Sejarah Panjang sebelum Merdeka. Fase perjuangan kemerdekaan melahirkan banyak para pejuang dan tokoh yang salah satunya adalah Tan Malaka. Tan Malaka lahir di Pandan Gadang, Suliki, Limapuluh Koto, Sumatera Barat pada tanggal 14 Oktober 1897. Nama Tan Malaka sebenarnya bukan nama asli melainkan gelar adat yang diberikan kepadanya, nama aslinya adalah Ibrahim. Ketika gelar Tan Malaka diberikan kepada Ibrahim, namanya menjadi Sutan Ibrahim Datuk Tan Malaka yang diwariskan menurut garis keturunan ibunya. Sutan Ibrahim Datuk Tan Malaka setelah lulus dari Sekolah Raja (Kweek School) pada bulan Oktober 1913 bersama gurunya yang bernama Hoesma berangkat ke Belanda untuk melanjutkan pendidikan di sekolah Guru (Rijkskweekschool) di Harleem (1913-1915). Tan Malaka mendapat bantuan dana dari Engku Fonds Foundation. Biaya ini dianggap sebagai pinjaman yang nantinya akan dibayarkan pada saat dia bekerja dan

memperoleh penghasilan. Semasa kuliah di Belanda, Tan Malaka mulai membaca buku-buku politik dan rajin mengikuti ceramah serta diskusi dengan sesama tokoh aktivis mahasiswa, termasuk mahasiswa asal Indonesia. Perang Dunia I (1914-1918) dan revolusi di Rusia yang melahirkan negara Sosialis pertama di dunia sangat mempengaruhi situasi dan suasana politik di Eropa, termasuk Belanda. Pengaruh gerakan kiri (sosialis) sangat kuat sehingga mempengaruhi Tan Malaka dan mahasiswa Indonesia melalui membaca karya-karya Karl Marx, Engels dan Lenin, karena tertarik dengan keberhasilan revolusi proletar Rusia. (Lionar, 2021:48-49).

Peran gerakan internasional turut mempengaruhi pergerakan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka sendiri memiliki keterlibatan dalam gerakan internasional, terutama dalam konteks gerakan komunis internasional. Sebagai seorang tokoh komunis. Dia menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh komunis dari berbagai negara dan terlibat dalam diskusi dan pertukaran pemikiran mengenai perjuangan kemerdekaan dan revolusi. Selain itu, gerakan internasional juga memberikan inspirasi dan dukungan bagi pergerakan kemerdekaan Indonesia. Pemikiran-pemikiran dari gerakan internasional, termasuk gerakan anti kolonialisme dan anti imperialisme mempengaruhi pemikiran dan strategi perjuangan para tokoh pergerakan nasional Indonesia, termasuk Tan Malaka (Santosa, 2016:38).

Tan Malaka berperan penting dalam mengembangkan konsep Republik bagi kemerdekaan Indonesia. Gagasan Tan Malaka untuk mencapai tujuan kemerdekaan Indonesia yang sejati berawal dari bukunya *Naar De Republik* (Menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia). Gagasan ini dirancang pada tahun 1925, jauh sebelum Indonesia merdeka. Hal ini juga dicetuskan sebelum “Menuju Indonesia Merdeka” karya Hatta pada tahun 1930 dan “Indonesia Menggugat” karya Sukarno pada tahun 1932, yang membahas tentang pentingnya kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Konsep Tan Malaka mengenai Republik bagi masyarakat Indonesia sangat Relevan karena upaya meletakkan konsep dasar bangsa yang dirintisnya tidak lepas dari situasi di Indonesia pada masa itu yang masih terjajah serta pandangan umum para pejuang kemerdekaan yang berpikir untuk melepaskan diri dari penjajah dan menyatukan wilayah Indonesia. Tan Malaka dalam hal ini sudah melihat secara Visioner adanya bentuk negara secara ideal yang bisa dipergunakan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan Masyarakat (Sirait,2023:336).

Metode Penelitian

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode literatur yang meliputi pengidentifikasian, penjelasan, penguraian secara sistematis melalui sumber-sumber yang

mengandung informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun langkah-langkah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Heuristik yaitu berasal dari Bahasa Yunani *Heurishein*, yang artinya memperoleh, sehingga penulisan ini diharapkan bisa lebih jauh dalam pencarian sumber-sumber yang lebih terperinci dan datanya yang relevan baik melalui buku-buku perpustakaan, artikel, jurnal dan yang lainnya (Birsyada,2022:83). Metode heuristik merupakan bagian dari penelitian dalam kajian Sejarah, heuristik adalah metode penelitian yang cermat untuk menghimpun jejak-jejak sejarah atau mengumpulkan dokumen-dokumen agar dapat mengetahui peristiwa-peristiwa bersejarah pada masa lampau, jejak atau dokumen yang berhasil dikumpulkan. Karya-karya tersebut antara lain, *Madilog (Materialisme, Dialektika, Logika)* dan *Naar de Republiek Indonesia*.
2. Kritik sumber sejarah adalah upaya untuk mendapatkan sumber yang otentisitas dan kredibilitas. Keaslian sumber peneliti dilakukan pengujian atas asli dan tidaknya sumber, berarti ia menyeleksi dari segi-segi fisik berdasarkan sumber yang di temukan. Jika sumber tersebut merupakan dokumen tertulis, maka yang diteliti ialah kertasnya, tintanya, gaya tulisan, bahasanya, kalimatnya, ungkapannya, kata-katanya, hurufnya, dan segi penampilan luarnya yang lain. Kredibilitas adalah sebagaimana dikemukakan dalam uraian terdahulu, bahwa kesaksian dalam sejarah merupakan faktor yang paling menentukan sah dan tidaknya bukti atau fakta sejarah itu sendiri (Pranoto,2014:35).
3. Analisis Sejarah berarti menguraikan, dan secara terminologi berbeda dengan sintesis yang berarti menyatukan. Namun keduanya, analisis dan sintesis, dipandang sebagai metode-metode yang digunakan didalam Interpretasi. Dalam penulisan ini setelah dilakukan kritik sumber, maka penelitian itu di analisis untuk mendapatkan data yang lebih spesifik, relevan, dan terkait dengan masalah yang diteliti. Kemudian diklarifikasi menurut jenis dan disintesiskan agar memperoleh hubungan antara data satu dengan data-data yang lainnya supaya sumber lebih akurat dan dapat dipercaya dalam penelitian (Kuntowijoyo, 1995:100).

Bukti-bukti sejarah yang merupakan saksi bisu atas peristiwa sejarah tidak berarti apa-apa jika belum di berikan penafsiran. Data dan fakta belum dapat menggambarkan sesuatu yang sebenarnya dari peristiwa sejarah yang terjadi. Metode interpretasi sejarah pada umumnya diarahkan kepada pandangan para ahli filsafat untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, sehingga sejarawan bisa mendapatkan kemungkinan jalan pemecahan dalam menghadapi masalah historis dan pandangan sejarah sendiri. Penulisan skripsi ini setelah dilakukan kritik sumber, maka sumber tersebut di analisis secara teliti

untuk mendapatkan data-data yang lebih spesifik, relevan dan terkait dengan masalah yang diteliti kemudian diklasifikasikan menurut jenisnya dalam penelitian yang diteliti (Mahanum, 2021:10).

Interpretasi tentang pemikiran Tan Malaka dalam upaya merumuskan konsep republik untuk Indonesia tahun 1925 dapat mencakup beberapa aspek penting, Hal ini akan membantu dalam memahami latar belakang pemikiran Tan Malaka dan urgensi merumuskan konsep republik dan akan membantu dalam memahami konteks global dari pemikiran Tan Malaka (Pratama,2018:71-73).

4. Historiografi merupakan cara penulisan, pemaparan, atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang dilakukan dari awal hingga akhir. Dari sudut etimologi, historiografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *hitoria* dan *grafein*. Dengan demikian, secara harfiah historiografi dapat diartikan sebagai uraian dalam penelitian yang di ambil datanya atau tulisan tentang hasil penelitian mengenai gejala yang terjadi ketika melakukan penelitian (Sulasman, 2014:147).

Hasil Penelitian

A. Situasi Sosial dan Politik di Indonesia tahun 1925.

Situasi sosial di Indonesia dipengaruhi oleh sistem kolonial Belanda yang berlangsung begitu lama sehingga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat pribumi (Yusuf Perdana, 2022:7). Orang Belanda/Eropa berada di puncak hierarki, diikuti oleh etnis Tionghoa dan Arab yang menempati posisi menengah sementara pribumi Indonesia berada di lapisan bawah. Kelas pribumi sendiri terbagi lagi antara bangsawan, pegawai pemerintah, petani, buruh, dan pedagang kecil. Kelas terbawah dalam tangga sosial kolonial ditempati oleh penduduk pribumi.

Pribumi dipisahkan menjadi beberapa kelompok menurut status sosial, ekonomi, dan profesionalnya yaitu elit pribumi dan pribumi biasa/rakyat biasa. Para pemimpin agama, pejabat pemerintah daerah, dan kaum bangsawan merupakan elit pribumi. Posisi elit pribumi didalam Struktur tatanan sosial kolonial masih berada di bawah kelompok Eropa dan Timur Asing meski kedudukannya lebih tinggi dibandingkan masyarakat biasa. Kalangan masyarakat biasa mencakup sebagian besar masyarakat pribumi. Mayoritas masyarakat pribumi hidup dalam kemiskinan tetapi disamping itu, masyarakat Belanda dan Timur asing mempunyai kehidupan mewah. Masyarakat pribumi kebanyakan bekerja dibidang pertanian sebagai petani kecil atau buruh tani, khususnya di daerah terpencil serta ada juga yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, pekerja kasar, dan pekerjaan berketerampilan rendah lainnya di perkotaan (Rachmawati, 2024:3).

Distribusi kekayaan dan kepemilikan tanah juga tidak merata, dimana sebagian besar petani pribumi tidak mempunyai tanah tetapi disisi lain masyarakat Belanda memiliki lahan luas dan sumber daya melimpah (Tan Malaka, 1987:16). Ketimpangan didalam distribusi kekayaan dan kepemilikan tanah membuat kebanyakan dari masyarakat pribumi terpaksa harus bekerja kepada orang-orang Belanda, contohnya sebagai pembantu rumah tangga atau menjadi buruh.

Para buruh pribumi yang bekerja di industri dan perkebunan milik belanda sering kali dipekerjakan dengan kondisi kerja yang memberatkan tapi dibayar dengan upah kecil. Penduduk pribumi secara mayoritas memiliki akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang sangat terbatas. Kelompok pribumi elit juga memiliki lebih banyak akses terhadap layanan kesehatan, hal ini berbanding terbalik dengan penduduk Pribumi biasa yang seringkali menerima layanan paling buruk, akibatnya didalam masyarakat pribumi terjadi rendahnya harapan hidup dan tingkat kesehatan buruk. Selain akses terhadap layanan kesehatan yang buruk, Belanda juga memberikan akses terhadap pendidikan yang tidak berbeda jauh, dimana masyarakat pribumi pada saat itu berpendidikan dengan sekolah berkualitas rendah dan hanya menawarkan pendidikan dasar kepada masyarakat biasa (Aeni, 2022:46).

Sementara itu, penduduk pribumi tinggal di wilayah dengan infrastruktur terbatas dan kondisi hidup yang sering kali miskin. Penduduk Pribumi menjalani kehidupan sederhana dan berpegang pada nilai-nilai kehidupan tradisional yang kuat tapi disisi lain Pengaruh budaya Barat mulai meresap ke dalam kehidupan sehari-hari mereka meskipun terdapat perlawanan terhadap penjajahan. Penduduk pribumi secara mayoritas menjadi sasaran eksploitasi, kemiskinan, dan terbatasnya akses terhadap layanan sosial dan pendidikan, dimana masyarakat belanda/Eropa menikmati hak istimewa dan kemakmuran. Diskriminasi-diskriminasi itu akhirnya membuat masyarakat pribumi mulai memunculkan gerakan sosial dan politik sebagai akibat dari kesenjangan sosial dan ekonomi (Rahmawati, 2022:298).

Masyarakat pribumi mulai mengorganisir perlawanan terhadap kendali kolonial dan menuntut hak yang lebih adil melalui organisasi seperti Sarekat Islam dan Partai Komunis Indonesia. Kaum muda dan Intelektual mulai menyuarakan kebebasan, kemandirian, dan keadilan sosial membuat Penduduk pribumi menjadi lebih sadar akan negaranya. Gerakan perlawanan anti-kolonialisme mulai meningkat dan banyak masyarakat pribumi berpartisipasi dalam demonstrasi, pemogokan kerja, dan gerakan bawah tanah menentang praktik-praktik diskriminatif dan eksploitatif pemerintah kolonial Belanda (Yusuf Perdana, 2022:9).

Situasi Politik di Indonesia mengalami perubahan dengan gerakan politik bumiputera yang menjadi terkenal seiring dengan strategi baru yang diadopsi oleh para pejuang kemerdekaan.

Gerakan Masyarakat dapat berbentuk jurnal dan surat kabar, pertemuan dan majelis, partai dan organisasi, serikat pekerja dan pemogokan, novel, lagu, drama, dan pemberontakan. Para pemimpin gerakan menyadari betapa pentingnya membentuk kelompok untuk mengorganisir masyarakat dan menentang penindasan yang dilakukan pemerintah kolonial melalui alat gerakan sosial (Rochadi, 2020:2).

Indonesia masih menjadi koloni Belanda pada tahun 1925, sistem kolonial yang diberlakukan mempunyai dampak signifikan terhadap iklim politik negara. Tujuan pemerintah Belanda dalam menerapkan sistem pemerintahan kolonial adalah untuk memaksimalkan keuntungan finansial dengan mengorbankan kemajuan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat pribumi (Ricklefs,2007:320). Pemerintahan ini terdiri dari sejumlah lembaga yang menjamin kekuasaan penuh atas rakyat dan tanah Indonesia. Situasi politik Indonesia pada masa itu dapat dilihat dari beberapa kekuatan penting yang mempengaruhi kondisi politik Indonesia dalam kerangka kolonialisme Belanda yaitu Kekuasaan kolonial Belanda dan kebangkitan Gerakan nasionalis.

Pemerintahan kolonial Belanda berusaha mempertahankan dominasi politik dan ekonomi atas Indonesia melalui sejumlah tindakan represif didalam sistem administrasi yang mengekang. Struktur administrasi sangat terpusat ke Batavia membuat pemerintahan kolonial Belanda dapat mengawasi seluruh tindak operasional di Indonesia. Administrasi kolonial di Indonesia memiliki struktur hierarkis yang ketat, mulai dari pusat kekuasaan di Belanda hingga ke pemerintahan lokal di Indonesia. Kekuasaan tertinggi Hindia Belanda atau Indonesia berada di tangan Gubernur Jenderal yang dipilih langsung oleh pemerintah Belanda. Gubernur Jenderal sebagai otoritas tertinggi di Hindia Belanda, mempertanggungjawabkan seluruh tindakannya kepada pemerintah Belanda (Dwiyanto, 2021:15).

Residen memegang kekuasaan yang luas dalam pengelolaan administrasi dan penegakan hukum di wilayahnya. Pada periode itu, beberapa pembagian residensi adalah sebagai berikut: Residensi Batavia: Meliputi wilayah sekitar ibu kota. Residensi Semarang: Termasuk bagian tengah pulau Jawa. Residensi Surabaya: Meliputi wilayah timur pulau Jawa. Residensi Palembang: Terletak di Sumatera Selatan. Residensi Bali dan Lombok: Mencakup pulau Bali dan Lombok. Setiap residensi dibagi lagi menjadi beberapa asisten residen yang mengelola distrik-distrik di bawahnya. Tujuan dari sistem ini adalah untuk menjamin kontrol yang efisien dari pemerintah kolonial dan dampaknya terhadap masyarakat pribumi dapat terlihat dari berbagai segi kehidupan. Meskipun residensi berkontribusi terhadap modernisasi dan pembangunan infrastruktur, residensi juga merupakan sarana penindasan dan eksploitasi yang memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi (Mulyadi, 2020:46).

Sistem Administrasi kolonial yang dibentuk Belanda memiliki beberapa fungsi dan tujuan utama, antara lain: *Eksplorasi Ekonomi*: Administrasi kolonial bertujuan untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja Indonesia. Sistem tanam paksa sebelumnya dan kebijakan ekonomi lain seperti Agrarische Wet bertujuan memaksimalkan keuntungan kolonial. *Kontrol Sosial dan Politik*: Administrasi kolonial memastikan kontrol penuh atas penduduk Indonesia melalui sistem pemerintahan yang terstruktur dan pengawasan ketat. Setiap bentuk perlawanan atau gerakan kemerdekaan ditekan dengan keras. *Pemungutan Pajak*: Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah kolonial. Sistem pemungutan pajak diterapkan secara ketat, sering kali memberatkan rakyat pribumi. *Penyebaran Pendidikan Kolonial*: Pendidikan yang disediakan oleh pemerintah kolonial sangat terbatas dan lebih berfokus pada mencetak tenaga kerja terdidik yang bisa membantu administrasi kolonial, bukan pada mencerdaskan kehidupan bangsa pribumi (Bachtiar, 2014:24).

Sistem kolonial yang diciptakan oleh Belanda begitu ketat sehingga menciptakan kebijakan-kebijakan tendensius dan merugikan masyarakat Indonesia. Kebijakan-kebijakan represif itu diantaranya sensor dan pengawasan media: Media tunduk pada pembatasan ketat oleh otoritas kolonial (Sodikin, 2023:200).

Tindakan-tindakan represif Belanda memunculkan gejala gerakan-gerakan pertentangan yang mengorganisir diri untuk melawan seperti SI, PKI, dan IP. Sejarah SI dapat dilihat dari tokoh pendirinya yaitu Haji Samanhudi. Haji Samanhudi mendirikan Sarekat Dagang Islam 16 Oktober 1905 yang dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan pedagang Islam dari pesaing asing, khususnya Cina. Nama organisasi itu akhirnya diubah pada saat kongres pertama, dengan nama Sarekat Islam pada tahun 1906 yang kemudian diakui kehadirannya oleh Pemerintahan Belanda pada tahun 1912. Namun seiring berjalannya waktu, SI menjelma menjadi kelompok politik yang mendukung keadilan sosial dan kemandirian bagi seluruh rakyat Indonesia. SI mempunyai peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap gerakan kemerdekaan dan menginspirasi massa untuk mengangkat senjata. Melalui berbagai inisiatif sosial dan politik, SI berhasil memperkuat gerakan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda dan meningkatkan rasa nasionalisme (Bela Wahyuni, 2022:56).

Indonesia juga memiliki kelompok politik pertama yang secara terbuka mendukung kemerdekaan Indonesia. Partai politik itu, bernama Indische Partij yang didirikan oleh Ernest Douwes Dekker, Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo, dan Suwardi Suryaningrat di Hindia Belanda pada tahun 1912. Indische Partij didirikan di Hindia Belanda dengan tujuan membela hak-hak politik, sosial, dan ekonomi masyarakat pribumi serta menyerukan agar adanya persamaan hak

antara Masyarakat pribumi dan warga negara Belanda. Persamaan hak itu, termasuk hak untuk memilih dan memegang jabatan publik (Wildan. 2014:64).

Indische Partij juga menuntut meningkatkan akses masyarakat terhadap Pendidikan dan mengakhiri adanya diskriminasi rasial di Hindia Belanda. Semangat nasionalisme dan cita-cita mewujudkan Indonesia merdeka, bersatu, dan berdaulat terus diusung dalam perjuangan Indische Partij meski berada di bawah tekanan dan pengawasan ketat penguasa colonial (Setiawati. 2023:52). Partai ini memainkan peran penting dalam mempengaruhi kesadaran nasional dan menjadi inspirasi bagi gerakan nasionalis berikutnya karena merupakan partai politik pertama yang secara terbuka mengadvokasi kemerdekaan dan persatuan di antara seluruh Masyarakat Indonesia.

B. Pemikiran Tan Malaka tentang bentuk Negara Republik Indonesia.

Pencapaian kemerdekaan bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perjuangan para pahlawan dalam menyampaikan gagasan-gagasan yang menggugah atau ide-ide politik progresif serta orang-orang yang benar-benar memperjuangkannya. Mengingat hal ini sehingga kita dapat mengerti mengapa begitu banyak pahlawan berjuang menyatukan bangsa untuk mencapai kemerdekaan. Gerakan itu dipicu karena kelompok dan individu di negara ini mulai semakin sadar akan identitas nasionalnya dan menginginkan pemerintahannya terbebas dari kekuasaan kolonial Belanda. Arah Pergerakan dari organisasi-organisasi itu, awalnya hanya mendasarkan tindakan pada semangat kemerdekaan sehingga tidak memiliki konsep mengenai seperti apa bentuk negara Indonesia ini. Pamflet yang ditulis Tan Malaka secara jelas menyatakan konsep bentuk negara Indonesia yang diinginkannya yaitu bentuk negara Republik (Kharisma,2023:331).

Tan Malaka adalah seorang revolusioner dan cendekiawan Indonesia yang gagasannya tentang kedaulatan rakyat, keadilan sosial, dan kemerdekaan diungkapkan dalam konsep republiknya. Beberapa gagasan pokok konsep republik Tan Malaka adalah sebagai berikut:

1. Kemerdekaan Bangsa

Kemerdekaan bangsa adalah ketika suatu negara mencapai kedaulatan penuh dan bebas dari dominasi asing. Makna kemerdekaan bangsa sangat mendalam dan esensial dalam perjuangan Tan Malaka. Tan Malaka menyatakan bahwa tujuan utama perjuangan bangsa adalah kemerdekaan bangsa, dimana setiap negara berhak atas kemerdekaan sehingga dapat memilih jalannya sendiri dan bebas dari campur tangan pihak luar (Rajiv, 2015:23).

Perjuangan rakyat diperlukan untuk mencapai kemerdekaan bangsa. Pentingnya mobilisasi luas dan partisipasi warga dalam perjuangan kemerdekaan hanya bisa dilalui dengan upaya kolektif dari seluruh lapisan masyarakat. Langkah-langkah yang dibutuhkan

untuk mencapai dan mempertahankan kemerdekaan bergantung pada solidaritas dan kesadaran masyarakat terhadap negaranya. Masyarakat harus sadar akan identitas nasionalnya dan bersatu melawan kolonialisme (Fajrul, 2016:156). Keadilan sosial dapat dicapai melalui kemerdekaan nasional karena dengan begitu perbaikan sosial dan ekonomi seperti pemerataan kekayaan dan pengentasan kemiskinan dapat diwujudkan. Kemerdekaan ekonomi sebagai salah satu komponen kemerdekaan nasional dengan menjamin kesejahteraan warganya, dimana didalam suatu negara yang mandiri harus mampu mengelola dan mengendalikan sumber dayanya sendiri (Marshanda, 2023:80).

2. Kedaulatan Rakyat

Tan Malaka menganggap kedaulatan rakyat sebagai prinsip dasar pemerintahan Republik yang menyatakan bahwa rakyat mempunyai kekuasaan tertinggi dalam negara karena merekalah yang mempunyai kedaulatan. Kedaulatan rakyat adalah sistem politik demokratis yang didasarkan pada gagasan bahwa rakyat memegang kekuasaan tertinggi. Kedaulatan itu memiliki persyaratan yang menyatakan bahwa perjuangan rakyat memberikan legitimasi kepada pemerintah. Kekuasaan penuh yang dipegang oleh rakyat dilalui dengan proses demokrasi seperti pemilu yang bebas dan adil dimana masyarakat harus memberikan legitimasi kepada pemerintah dan lembaga negara (Andrianus,2019: 37).

Keterlibatan Masyarakat dalam politik sangat penting sehingga masyarakat harus berpartisipasi dalam pengambilan keputusan baik secara langsung atau melalui wakil-wakil mereka yang terpilih. Rakyat harus bebas menentukan nasib mereka sendiri tanpa campur tangan kekuatan asing. Kedaulatan rakyat memberikan kebebasan dan kesetaraan bagi semua individu. Pemberian penghormatan terhadap kebebasan dan hak asasi manusia sangat dibutuhkan sehingga Individu secara bebas dapat berekspresi, berkumpul, dan berorganisasi tanpa perlu khawatir akan represi pemerintah atau pihak lain (Ravyansah,2022:58).

3. Keadilan Sosial dan ekonomi

Keadilan sosial mempunyai peran krusial dalam pemahaman Tan Malaka terhadap konsep republik. Menurut Tan Malaka, Republik yang dapat menjamin keadilan sosial bagi seluruh warganya adalah republik yang sempurna. Keadilan sosial didalam konsepsi Republik mencakup pembelaan hak-hak sosial dan ekonomi warga negara serta alokasi pendapatan dan sumber daya pemerintah yang adil. Satu-satunya cara untuk mencapai keadilan sosial adalah kelas pekerja yang dieksploitasi oleh kelas borjuis dalam

masyarakat kapitalis harus diakhiri. Penyeruan revolusi proletar digaungkan untuk menggulingkan tatanan kapitalis dan menegakkan sosialisme sehingga rakyat memiliki alat produksi secara kolektif (Amri,2017:7).

Keterlibatan warga negara secara aktif dalam proses politik dan ekonomi sangat diperlukan. Sistem ekonomi di Indonesia sering dikaitkan dengan sistem ekonomi kapitalis di Barat yaitu sebuah sistem yang sejalan dengan semangat tujuan penanaman modal. Selama ini kapitalisme dikritik oleh pemikiran-pemikiran kritis di masyarakat Indonesia, hal ini dikarenakan kapitalisme sering dikaitkan dengan kolonialisme dimana negara-negara Barat yang datang ke nusantara untuk mendirikan koloni dagang sebagai upaya mencuri kekayaan penduduk Indonesia demi mendapatkan keuntungan finansial. Tanam paksa adalah salah satu contoh ketika sumber daya alam dan sumber daya manusia dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan imperialis barat (Birsyada,2016:115). Sehingga pengambilan keputusan ekonomi secara demokratis yang melibatkan seluruh anggota masyarakat merupakan komponen penting dalam keadilan sosial. Hal ini tidak terjadi dalam sistem kapitalisme yang hanya mementingkan sekelompok elit yang berjumlah sedikit, kaya, dan berkuasa tetapi sering kali mengambil keputusan ekonomi.

Hak-hak ekonomi Masyarakat harus dibela termasuk hak atas pekerjaan yang terhormat, kompensasi yang adil, dan akses tanpa hambatan terhadap kemungkinan finansial. Penghapusan sistem kapitalis dan penerapan sistem sosialis dianggap penting untuk mencapai keadilan ekonomi. Kepemilikan masyarakat atas alat-alat produksi merupakan prasyarat untuk mencapai keadilan ekonomi. Hal ini berarti pengelolaan lahan, industri, dan sumber daya alam harus dilakukan demi kepentingan semua orang dan bukan hanya segelintir orang (Pratama,2018:75).

Tan Malaka menganggap betapa pentingnya distribusi kekayaan secara adil dan merata ke seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, setiap orang harus mempunyai akses yang sama terhadap kekayaan yang dihasilkan Masyarakat (Ahmad,2021:149).

4. Pendidikan dan Kesadaran Politik

Tan Malaka sangat menekankan pentingnya pendidikan dan kesadaran politik dalam perjuangannya untuk keadilan sosial dan ekonomi. Dia percaya bahwa hanya melalui pendidikan yang tepat dan peningkatan kesadaran politik, rakyat dapat memahami hak-hak mereka dan berpartisipasi aktif dalam membangun masyarakat yang lebih adil (Koerniawati,2023:4395). Langkah penyadaran lewat Pendidikan memungkinkan seseorang untuk memasuki proses sejarah sebagai subjek-subjek yang bertanggung jawab, dan mengantarkan mereka masuk kedalam pencapaian afirmasi diri sendiri sehingga

menghindarkan fanatisme (Birsyada, 2016:179). Penyadaran ini melibatkan Semua kelas sosial, terutama petani dan kelas pekerja harus memiliki akses yang sama terhadap Pendidikan supaya dapat mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.

Pendidikan harus diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat dan realitas sosial sehingga penekanan terhadap kondisi sosial ekonomi, penderitaan masyarakat sepanjang sejarah, dan solusi permasalahan dapat dimasukkan didalam kurikulum Pendidikan. Bahwa untuk melawan penindasan, masyarakat perlu menyadari posisi mereka serta jenis penindasan yang mereka alami dan kemampuan mengorganisir diri untuk melawan. Pendidikan tidak hanya mencakup pengetahuan akademis tetapi juga pemahaman politik. Pendidikan politik dianggap penting karena memberikan pengajaran kepada individu tentang hak-haknya sebagai warga negara, distribusi kekuasaan, dan cara berpolitik. Tujuan pendidikan politik adalah untuk menghasilkan warga negara yang aktif dan memahami peran mereka dalam pembangunan bangsa (Dandy, 2023:44).

Tan Malaka menganggap bahwa meningkatkan kesadaran politik masyarakat perlu menjadi tujuan pendidikan. Individu yang sadar politik harus berorganisasi dalam serikat buruh, asosiasi petani, dan kelompok masyarakat lainnya, dimana kekuatan organisasi massa bermanfaat untuk menyatukan masyarakat dan memperkuat perjuangan mereka sehingga tidak dapat disepelekan (Koerniawati,2023:4394).

Menurut Tan Malaka, mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dimulai dengan meningkatkan kesadaran politik dan pendidikan masyarakat. Masyarakat dapat diberdayakan untuk memperjuangkan hak-haknya dan menciptakan masa depan yang lebih baik melalui pendidikan yang meningkatkan keterlibatan politik, meningkatkan kesadaran kelas, dan relevan dengan realitas sosial. Konsepsi republik Tan Malaka menganggap kesadaran politik dan pendidikan adalah alat penting dalam perjuangan kedaulatan rakyat, keadilan ekonomi, dan keadilan sosial (Malaka,1987:83-84).

C. Dampak Pemikiran Republik Tan Malaka untuk Indonesia

Konsep republik yang dirumuskan oleh Tan Malaka pada tahun 1925 memiliki dampak yang signifikan dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia serta dalam perkembangan pemikiran politik di negeri ini. Pengaruh pemikiran Tan Malaka dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia sangat penting sampai mempengaruhi tokoh-tokoh perjuangan yang berada di Indonesia seperti Soekarno dan Moh. Hatta (Setiawan,2024:142-143). Tan Malaka mengartikan Republik sebagai bentuk pemerintahan di mana kekuasaan berada pada rakyat secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilihnya. Konsep ini muncul dari

pandangannya yang progresif dan anti-kolonial, dimana republik menjadi simbol kemerdekaan dan kedaulatan dari penjajahan.

Sukarno menyatakan bahwa Republik adalah wujud dari kehendak rakyat yang merdeka dan memiliki kontrol penuh terhadap nasib bangsanya sendiri. Sukarno juga menekankan pentingnya republik sebagai bentuk pemerintahan yang bersifat inklusif dan memberikan kesempatan bagi seluruh rakyat untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara. Konsep republik yang diperjuangkan oleh Tan Malaka memiliki dampak yang nyata dalam cara Sukarno mengartikulasikan visi politiknya melalui tulisan-tulisan dan pidato-pidato penting. Penekanan pada Integrasi Nasional juga dilakukan Sukarno dengan menghubungkan konsep republik dengan integrasi nasional dan persatuan Indonesia yang lebih luas. Contohnya dari bagaimana dia membangun narasi politik yang inklusif untuk mempersatukan berbagai suku, agama, dan golongan dalam perjuangan kemerdekaan (Agus,2023:529).

Mohammad Hatta merupakan seorang ekonom dan politikus yang juga menerima konsep kedaulatan rakyat yang diusung oleh Tan Malaka. Baginya, republik adalah instrumen untuk menegakkan demokrasi di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam mengambil keputusan politik dan ekonomi. Hatta menjadikan konsep ini sebagai landasan untuk merancang struktur pemerintahan dan ekonomi yang adil setelah kemerdekaan. Penggabungan konsep republik dengan visi ekonominya dapat terlihat dalam karyanya yang terkenal tentang ekonomi politik Indonesia. karyanya berisi Analisis tentang bagaimana Hatta mengembangkan strategi politik berdasarkan prinsip-prinsip republik untuk membangun fondasi ekonomi yang berkeadilan pasca-kemerdekaan. Implementasinya juga dilihat didalam Konsep Struktur Pemerintahan, dimana langkah-langkah legislatif atau konstitusional yang Hatta rancang untuk mencerminkan nilai-nilai republik dalam struktur pemerintahan Indonesia yang baru. Hatta memandang pentingnya membangun lembaga-lembaga demokratis yang kuat untuk mengamankan kedaulatan rakyat (Herlina, 2014:221).

Sutan Sjahrir merupakan salah satu pemimpin yang sangat dipengaruhi oleh konsep republik Tan Malaka dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sjahrir mengartikan republik sebagai bentuk pemerintahan yang didasarkan pada kedaulatan rakyat dan penolakan terhadap dominasi kolonial. Dia adalah sosialis demokrat yang percaya pada demokrasi parlementer dan kerja sama dengan partai politik lainnya. Di sisi lain, Tan Malaka adalah seorang revolusioner yang mendukung revolusi sosialis langsung untuk mencapai republik Indonesia. Dia lebih radikal dalam pendekatannya dan kurang percaya pada institusi-institusi yang ada. Menurut pemikirannya, bahwa setiap strategi yang mengabaikan berbagai bentuk power tersebut akan mengakibatkan kegagalan. Untuk melipatgandakan power, aktor harus berusaha bertahan dan

melawan dengan jalan melipatgandakan resistensi dan kontra-ofensif. *Localize-resistence* tersebut haruslah bersifat radikal dan tanpa kompromi untuk melawan totalitas kekuasaan atau penjajahan (Birsyada, 2016: 317-318). Sjahrir pada awalnya mendukung ide untuk bekerja sama dengan Belanda dengan konsep Indonesia Serikat yang mengakui kedaulatan Indonesia tetapi dalam kerangka federal yang lebih luas. Sjahrir dikenal dengan gaya kepemimpinan yang diplomatis dan mampu berkomunikasi dengan baik di tingkat internasional seperti yang terlihat dalam perannya sebagai perdana Menteri (Kholid,2016:59).

PNI yang didirikan oleh Soekarno pada tahun 1927 ikut terpengaruh oleh semangat radikalisme dan antikolonialisme Tan Malaka. Tan Malaka mengajarkan pentingnya perjuangan yang keras dan revolusioner untuk mengusir penjajah dan mencapai kemerdekaan. Gagasan Republik tercermin dalam program kerja dari PNI yaitu (1) Non-Kooperasi: Kebijakan non-kooperasi dengan pemerintah kolonial yang diusung oleh PNI mencerminkan pandangan Tan Malaka tentang perlunya menolak kerjasama dengan penjajah untuk mencapai kemerdekaan. (2) Persatuan Nasional: PNI menekankan pentingnya persatuan nasional di antara berbagai kelompok etnis dan agama di Indonesia (Sulistyo,2018:160).

SI juga ikut terpengaruh dengan pemikiran Tan Malaka Selain PNI, meskipun bukan anggota Sarekat Islam tetapi ide-idenya tentang sosialisme mempengaruhi beberapa tokoh dalam SI. Tan Malaka melihat pentingnya menggabungkan elemen-elemen sosialisme dengan semangat Islam untuk memobilisasi massa yang lebih luas. Konsep itu tercermin dalam SI yang berusaha menggabungkan nilai-nilai Islam dengan perjuangan kelas. SI meskipun berlandaskan pada nilai-nilai Islam tapi juga mengadopsi sikap anti-kapitalis yang kuat dengan memfokuskan perjuangannya pada perbaikan kondisi sosial-ekonomi kaum pribumi yang tertindas (Raden, 2019:144).

Tan Malaka memiliki pengaruh yang cukup luas terhadap organisasi-organisasi di Indonesia tetapi beliau adalah orang yang menjadi salah satu pendiri awal PKI dan memainkan peran penting dalam menyebarkan ideologi komunisme di Indonesia. Dia menekankan bahwa hanya melalui pendidikan politik yang luas, rakyat bisa menyadari kondisi penindasan mereka dan bergerak bersama untuk perubahan (Ponirin,2019:66).

Kesimpulan

Dari pengkajian literature yang telah penulis lakukan maka diberikan Kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, kondisi sosial dan politik di Indonesia dipengaruhi oleh sistem kolonial Belanda yang berlangsung begitu lama sehingga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat pribumi. Terdapat sistem Hirarki kelas di Indonesia diantaranya kelas atas (orang Belanda), kelas menengah (orang Arab, Cina, dan India), kelas bawah (orang

Pribumi). Pemerintahan Belanda Menunjuk Gubernur Jendral Untuk memimpin wilayah Jajahannya di Indonesia. tercipta juga Dewan Hindia dan sistem Keresidenan sebagai Upaya untuk mengatur Indonesia. ketimpangan yang terjadi dalam skala sosial dan politik mengakibatkan Masyarakat Indonesia memiliki akses yang buruk terhadap segala bentuk layanan seperti Pendidikan, Kesehatan, pekerjaan, dan kepemilikan tanah. Sistem kolonial yang dibangun Belanda selalu menekan Masyarakat Indonesia, adanya Tindakan represif sebagai salah satu aspek yang dilakukan agar Masyarakat Indonesia tidak melakukan perlawanan. *Kedua*, dikarenakan kondisi Masyarakat yang menggenaskan Tan Malaka membuat salah satu upaya dengan cara merumuskan konsep republik bagi Indonesia sebagai upaya untuk menyatukan masyarakat agar terciptanya revolusi. Konsep republik tan Malaka memuat berbagai aspek seperti kemerdekaan Indonesia, kedaulatan rakyat, keadilan sosial dan ekonomi, serta Pendidikan dan kesadaran Politik. *Ketiga*, dampak dari pemikiran tan Malaka tersebut mempengaruhi tokoh-tokoh pergerakan dan organisasi-organisasi perjuangan kemerdekaan seperti Soekarno, Muhamad Hatta, Sutan Syahrir, SI, PNI, dan PKI. Kelompok dan individu di negeri ini mulai semakin menyadari identitas nasionalnya dan menginginkan pemerintahannya terbebas dari kekuasaan kolonial Belanda yang dimana, awalnya Perjalanan organisasi-organisasi ini hanya ditentukan oleh semangat kemerdekaannya dan tidak merencanakan seperti apa bentuk negara Indonesia nantinya. Hingga akhirnya datanglah Tan Malaka, seorang tokoh pergerakan yang sangat berjasa menciptakan bentuk negara Indonesia. Tan Malaka sangat jelas mengenai tipe pemerintahan Indonesia yang ia impikan yaitu republik dan menggap bahwa ketika suatu negara memperoleh kedaulatan penuh dan bebas dari kekuasaan asing, maka negara tersebut dikatakan telah mencapai kemerdekaan nasional.

Daftar Pustaka

- Akob,Bachtiar. 2014. *Malaise Dan Pengaruhnya Terhadap Gerakan Nasional Indonesia*.
Jurnal Seuneubok Lada, No.1, Vol.2 Juli –Desember 2014.
- Andrianus pito, Toni. 2019. *Mengenal Teori-Teori Politik dari Sistem Politik sampai Korupsi*.
Bandung: Nuansa Cendekia.
- Birsyada, Muhammad Iqbal. 2016. *Budaya Keraton Pada BABAD Tanah Jawi Dalam Perspektif Pedagogi Kritis*. oai:ojs.journal2.um.ac.id:article/124.
- Birsyada, Muhammad Iqbal, Wasino, Suyahmo, & Joebagio, Hermanu. 2016. *Bisnis Keluarga Mangkunegaran*. Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 24 No. 1, Mei 2016, 111-136

- Birsyada, Muhammad Iqbal. 2016. *Legitimasi Kekuasaan Atas Sejarah Keruntuhan Kerajaan Majapahit dalam Wacana Foucault*. Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 24 No. 2, November 2016, 311-332.
- Birsyada, Muhammad Iqbal & Hidayah, Siti Nurul. 2022. *Peranan Ulama MUHAMMADIYAH Dalam Pembentukan APS (Askar Perang Sabil) Di Yogyakarta Tahun 1947-1949*. *HISTORIA: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*, 5(1), 81-88.
- Dandy. 2023. *Pemikiran Tan Malaka tentang Pendidikan, 1920-1926*. *ANALISIS SEJARAH*, Vol. 13 No. 1, 2023, 42-53
- Dharma, Rajiv. 2013. *Pemikiran Politik Tan Malaka Menuju Kemerdekaan Indonesia*. *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah*, Volume 11, Nomor 1, Juni 2013, hlm. 1-70.
- Dwiyanto, Agus. 2021. *Reformas Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Edrisy, Ibrahim Fikma. 2022. *Pengantar Sosiologi*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Islam, Muhamad Fajrul. 2016. *Pemikiran Politik (Madilog) Tan Malaka Menuju Kemerdekaan Indonesia*. *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* Volume 6, Nomor 2, Juli-Desember 2016.
- Junaidi, Muhammad. 2016. *Ilmu Negara*. Malang: Setara Press.
- Lapian, Dkk. 2012. *Indonesia dalam Arus Sejarah*. Jakarta: PT Ichtisar baru van hoeve
- Lionar, Uun. 2021. *Tan Malaka: Dari Gerakan hingga Kontroversi*. Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol. 10 (1) : 43-59, Februari 2021.
- Malaka, Tan. 1987. *Menuju Republik Indonesia*. Jakarta: Yayasan Massa
- Malaka, Tan. 2007. *MADILOG*. Jakarta: Widjay
- Mulyadi Noor, Muhamad Mulki. 2020. *Dewan Kabupaten Batavia: Sejarah Desentralisasi Di Hindia Belanda (1928-1934)*. *Sejarah dan Budaya*, 14 (2), 2020, hlm. 45-61.
- Muhammad, Junaidi. 2016. *Ilmu negara*. Malang: Setara Pres
- Ningsih, Setiawati. 2023. *Kontribusi Gagasan Kritis Dari Tiga Serangkai Dalam Mewujudkan Nasionalisme Indonesia (1912-1914)*. *Krinok, Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi*, Vol. 2 No. 3, Desember (2023) Hal.47-55
- Perdana, Yusuf. 2022. *Sejarah Pergerakan Nasional*. Klaten: Lakeisha Peturun, Penta. 2021. *Masa Depan Konstitusi Demokrasi Indonesia: Post Democracy*. *Muhammadiyah Law Review* 5 (2), Juli 2021
- Ponirin. 2019. *Pemikiran Politik Tan Malaka Tentang Konsep Negara Indonesia*. *Puteri Hijau* Vol.4 No. 1. 2019

- Rachmawati, Nindiya. 2024. *Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Indonesia Menjelang Kemerdekaan (Pada Masa Penjajahan Jepang)*. Sindoro Cendekia Pendidikan Vol. 5 No 3 Tahun 2024.
- Rahman, Masykur Arif. 2018. *Tan Malaka*. Yogyakarta: Laksana.
- Rahmawati, Risma. 2022. *Perkembangan Kondisi Ekonomi Bangsa Indonesia Pada Masa Hindia Belanda Tahun 1900-1940*. ESTORIA Volume (2), No. (2), Bulan Tahun (2022).
- Ricklefs, M.C. 2007. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: Serambi
- Ridwan, Juniarso. 2017. *Tokoh-tokoh Ahli Pikir Tentang Negara dan Hukum*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Robet, Robertus. 2021. *Republikanisme*. Tengerang: CV Margin Kiri
- Rochadi, Sigit. 2020. *Gerakan Buruh Indonesia: Perlawanan Dan Fagmentasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Russell, bertrand. 2004. *Sejarah Filsafat Barat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Samidi, Raden. 2019. *Mengurai Gagasan Tan Malaka sebagai Bentuk Kontribusi Terhadap Pemerintah Republik Indonesia*. Forum Ilmu Sosial 46 (2), December 2019, pp. 142-153
- Santoso, Kholid. 2016. *Tan Malaka dan Syahrir dalam kemelut Sejarah*. Bandung: Segarsy
- Setiyarini, Herlina. 2014. *Pemikiran Mohammad Hatta Tentang Ekonomi Koperasi Tahun 1925-1953*. AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah, Volume 2, No. 3, Oktober 2014
- Sirait, Kharisma. 2023. *Sejarah Pemikiran Politik Tan Malaka Mengenai Kemerdekaan Dan Konsep Negara Indonesia*. Journal Transformation of Mandalika. Vol. 4, No. 6, 2023.
- Stroomberg, Dr. J. 2018. *Hindia Belanda 1930*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Sutrisman, Dudih. 2019. *Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, dan Mahasiswa*. Bandung : Guepedia.
- Utomo, Wildan Sena. 2014. *Nasionalisme dan Gagasan Kebangsaan Indonesia Awal: Pemikiran Soewardi Suryaningrat, Tjiptomangoenkusumo dan Douwes Dekker 1912-1914*. Lembaran Sejarah, Vol. 11, No. 1, April 2014.
- Wahyuni, Bela. 2022. *Analisi Masa Pergerakan Nasional Indonesia 1908-1942*. Siginjai: Jurnal Sejarah, Vol. 2 No. 1, Juni 2022 (54-67)